

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti mengkaji beberapa karya ilmiah terdahulu yang membahas tentang program Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Penelitian yang difokuskan adalah pada skripsi yang hampir sama dengan penelitian penulis. Diantaranya adalah:

Pertama, Samsul Alil Bahril menulis sebuah skripsi yang berjudul *“Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kecamatan Tambolo Pao Kabupaten Gowa”*. Mahasiswa Jurusan PMI Konsentrasi Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makasar pada tahun 2017. Fokus penelitian ini yaitu bagaimana cara peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kecamatan Tambolo Pao Kabupaten Gowa yang diuraikan dalam beberapa masalah: (1) Bagaimana upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kecamatan Tambolo Pao Kabupaten Gowa.¹⁴ Adapun perbedaan antara penelitian Samsul Ali Bahril dengan penelitian penulis jika Samsul Ali Bahril membahas tentang upaya peningkatan dan efektifitas kesejahteraan sosial masyarakat melalui program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) maka penulis

¹⁴ Samsul Ali Bahril, *“Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kecamatan Tambolo Pao Kabupaten Gowa”*, Skripsi, (Makassar: UIN Alauddin, 2017), t.d.

meneliti pemberdayaan masyarakat melalui program Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Kedua, Ristinura Indrika menulis sebuah skripsi yang berjudul *“Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Tanjung Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup (Studi di Desa Wonokerso Tembarak Temanggung)”*. Mahasiswa Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2013. Penelitian ini mendeskripsikan: (1) Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Tanjung, pendekatan partisipatif dalam program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Tanjung, (2) Keberhasilan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Tanjung, dan (3) Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Tanjung.¹⁵ Adapun perbedaan antara penelitian Ristinura Indrika dengan penelitian penulis yaitu jika Ristinura Indrika membahas tentang pendekatan partisipatif, keberhasilan, faktor pendukung dan penghambat program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) maka penulis meneliti yaitu pemberdayaan masyarakat melalui program Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Ketiga, Nur Syamsiyah menulis sebuah skripsi yang berjudul *“Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Aleksa Lestari RW.003 Cipedak Jagakarsa Jakarta Selatan”*. Fokus

¹⁵ Ristinura Indrika, *“Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Tanjung Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup (Studi di Desa Wonokerso Tembarak Temanggung)”*. Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2013), t.d.

kajiannya ialah pemberdayaan ekonomi dan proses yang dilakukan oleh Ibu Mardiah dalam melakukan pemberdayaan di masyarakat. Perbedaan peneliti dan penulis ialah dari objek, subjek dan lokasi penelitian.

Persamaan peneliti dan penulis sama-sama menjelaskan program kelompok usaha bersama (KUBE). Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata tulisan dan lisan dari orang yang diamati.¹⁶

Keempat, Amanah Aida Qur'an menulis sebuah skripsi yang berjudul *“Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Studi Pada KUBE Kaligondang Purbalingga Jawa Tengah”*.

Adapun perbedaan antara penelitian Amanah Aida Qur'an dengan penulis tempat lokasi penelitian lapangan. Sedangkan persamaan Amanah Aida Qur'an dengan penulis membahas penelitian tentang pemberdayaan masyarakat pada kelompok usaha bersama (KUBE).

Penelitian ini menggunakan penelitian metode kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata tulisan dan lisan dari orang yang diamati.¹⁷

Kelima, Albertina Levina Aboda (2016), menulis sebuah judul skripsi *“Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Ternak Kambing Di Dusun Karangnongko, Desa Kemiri Kecamatan Tanjungsari,*

¹⁶Nur Syamsiyah, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Aleska Lestaro RW, 003 Cipedak Jagakarsa, Jakarta Selatan, skripsi,* (Purwokerto: Insitut Agama Islam, 2017), hlm .6.

¹⁷Amanah Aida Qur'an, *Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) (Studi Pada KUBE Kaligondang Purbalingga Jawa Tengah), Skripsi,* (Purwokerto: Institut Agama Islam, 2017), hlm .6.

Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta''. Fokusnya kajian ialah untuk mengetahui proses pemberdayaan masyarakat pada kelompok usaha bersama.¹⁸

Adapun perbedaan Albertina Levina Aboda dengan penulis yaitu lokasi penelitian, data dan sumber data. Sedangkan persamaan Albertina Levina Aboda dengan penulis yaitu menjelaskan tentang pemberdayaan masyarakat melalui program kelompok usaha bersama.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian Kualitatif deskriptif berupa kata tulisan, wawancara dan observasi lapangan penelitian.

B. Kerangka Teori

1. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan dalam Bahasa Inggris disebut sebagai "empowerment". Istilah pemberdayaan diartikan sebagai upaya mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki masyarakat agar menjadi sebuah sistem yang bisa mengorganisasikan diri mereka sendiri secara mandiri. Individu bukan sebagai objek melainkan sebagai pelaku yang mampu mengarahkan diri sendiri kearah yang lebih baik.

Secara konseptual pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* (kekuasaan atau kekuatan).¹⁹ Pemberdayaan menunjuk pada

¹⁸ Albertina Levina Aboda, *Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Ternak Kambing Di Dusun Karangnongko, Desa Kemiri, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Skripsi*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD, 2016), hlm .21.

kemampuan orang khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam: (1) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom) dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat melainkan bebas dari kelaparan dan kebodohan, (2) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang dan jasa yang mereka perlukan, (3) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan yang mempengaruhi mereka.²⁰

Menurut Kindervater dan Kusnadi, pemberdayaan adalah proses peningkatan kemampuan pribadi dalam pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk memahami dan mengendalikan statusnya dalam masyarakat.

Menurut Edi Suharto, pemberdayaan adalah proses dimana masyarakat menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi, mengontrol dan mempengaruhi peristiwa dan institusi yang mempengaruhi kehidupan mereka. Pemberdayaan ini menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuatan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupan mereka dan kehidupan orang lain yang berhubungan dengan mereka. Menurut Djohani, pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mengembangkan kapasitas masyarakat agar mampu secara mandiri memiliki keterampilan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri.

¹⁹ Edi Sugarto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial*, (Bandung: PT. Ravika Adimatama, 2005), h. 57.

²⁰ *Ibid.*, h. 58.

Menurut Priyono dan Planalka meyakini bahwa pemberdayaan memiliki dua arti, yaitu pembangunan, kemandirian, pemberdayaan diri dan penguatan posisi tawar masyarakat bahwa terhadap tekanan berbagai bidang dan bidang kehidupan. Kedua melindungi, mempertahankan, dan berjuang berdampingan dengan yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi yang lemah.²¹

Beberapa pandangan di atas, pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memecahkan masalah sendiri, menambah sumber daya manusia serta meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjaga kemandirian.

a. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah suatu kondisi yang dimana mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Hak dan kewajiban tersebut terwujud dalam kesempatan, kedudukan, dan peran. Peluang kedudukan dan peran tersebut dilandasi saling membantu dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Upaya pemberdayaan masyarakat membutuhkan seluruh dukungan semua pihak seperti pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat.

Pemberdayaan yang dilakukan akan berdampak pada pemberdayaan masyarakat untuk menghilangkan hambatan struktural, sehingga masyarakat yang berdaya tersebut dapat mengembangkan potensi dan kemampuannya

²¹ Siti Kurnia Widiastuti, *Pemberdayaan Masyarakat Marginal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Dan LSBA, 2015), h. 13.

dalam menghadapi tantangan eksternal yang timbul dari pembangunan. Mengacu pada kondisi atau hasil yang dicapai melalui perubahan sosial yaitu meningkatkan masyarakat yang tidak berdaya dalam meningkatkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti fisik, ekonomi, dan sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu berkomunikasi, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan melakukan tugas-tugas kehidupan secara mandiri.

Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan mengutip pendapat Mardikanto terdapat enam tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu:

- 1) Perbaikan kelembagaan yaitu perbaikan kegiatan atau tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan termasuk pengembangan jejaring kemitraan.
- 2) Perbaikan usaha yaitu setelah kelembagaan mengalami perbaikan diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan sehingga memberikan kepuasan kepada seluruh anggota lembaga dan memberikan manfaat kepada masyarakat di sekitar lingkungannya.
- 3) Perbaikan pendapatan yaitu diharapkan dapat memperbaiki pendapatan yang diperoleh termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.
- 4) Perbaikan lingkungan yaitu diharapkan dapat memperbaiki lingkungan baik fisik dan sosial karena kerusakan lingkungan seringkali terjadi disebabkan kemiskinan atau pendapatan terbatas.

- 5) Perbaiki kehidupan yaitu diharapkan dapat memperbaiki keadaan lingkungan setiap keluarga dan masyarakat.
- 6) Perbaiki masyarakat yaitu bila setiap keluarga mempunyai kehidupan yang baik yang didukung oleh lingkungan fisik dan sosial, maka diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.²²

Sri Hardini mengutip pendapat Dahama dan Bhamagar yang mengungkapkan prinsip-prinsip pemberdayaan yaitu:

- 1) Organisasi masyarakat bawah yaitu pemberdayaan akan efektif jika mampu melibatkan organisasi masyarakat bawah sejak dari setiap keluarga dan kekerabatan.
- 2) Minat dan kebutuhan hidup pemberdayaan akan efektif jika selalu mengacu pada minat dan kebutuhan suatu masyarakat.
- 3) Penggunaan metode yang sesuai yaitu pemberdayaan harus dilakukan dengan penerapan metode yang disesuaikan dengan kondisi seperti lingkungan fisik, kemampuan ekonomi, dan nilai sosial budaya.
- 4) Kerjasama dan partisipasi yaitu pemberdayaan yang akan efektif jika mampu mengajak masyarakat berpartisipasi untuk selalu berkerjasama dalam melaksanakan program-program pemberdayaan yang telah dirancang.

²² Dedeh Maryani, et. All., *Op., Cit*, h .8-11.

- 5) Kepuasan yaitu pemberdayaan harus mampu mewujudkan tercapainya kepuasan karena menentukan keikutsertaan sasaran pada program pemberdayaan masyarakat.²³

Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan mengutip pendapat Soekanto pemberdayaan masyarakat mempunyai tujuh tahapan atau langkah yang dilakukan antara lain:

- 1) Tahap persiapan, tahap ini terbagi menjadi dua tahapan yaitu penyiapan petugas tenaga pemberdayaan masyarakat dan penyiapan lapangan yang dilakukan secara nondirektif.
- 2) Tahap pengkajian (*asement*), tahap proses pengkajian dapat dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan (*feel needs*) dan juga sumber daya yang dimiliki klien.
- 3) Tahap perencanaan alternatif program, tahap ini sebagai agen perubahan (*exchange agent*) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.

²³ Sri Hardini, et. all., *Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pengembangan UKM Di Wilayah Pesisir*, (Surabaya: Soepindo Media Pustaka, 2019), h .44-46.

- 4) Tahap pemformalisasi rencana aksi, tahap ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada sehingga penyandang dana akan paham terhadap tujuan dan sasaran pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan tersebut.
- 5) Tahap implemntasi program, pada tahap ini seluruh peserta program dapat memahami secara jelas akan maksud, tujuan, dan sasaran program sehingga dapat implementasikannya tidak menghadapi kendala.
- 6) Tahap evaluasi, sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan diharapkan dapat diketahui secara jelas dan terukur seberapa besar keberhasilan program yang dapat dicapai.
- 7) Tahap pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran sehingga masyarakat yang diberdayakan telah mampu mengatur dirinya untuk bisa hidup lebih baik dan menjamin kelayakan hidup bagi dirinya dan keluarganya.²⁴

b. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan beberapa strategi pemberdayaan yaitu:

²⁴ Dedeh Maryani, et. all., *Op. Cit.*, h .13-14.

1) Penguatan lembaga dan organisasi masyarakat
Dalam mengembangkan kapasitas masyarakat melalui peningkatan keterampilan dan pengetahuan, penyedia sarana dan prasarana seperti modal, fasilitas, dan sehingga dapat memperluas kerjasama dan mendirikan pendapatan yang layak.

2) Mengembangkan kapasitas masyarakat
Dengan mengembangkan sistem perlindungan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan seperti halnya masyarakat yang terkena dampak pendapatan ekonomi.

3) Mengurangi berbagai bentuk peraturan dalam masyarakat
Untuk membangun lembaga dan organisasi guna menyalurkan pendapat melakukan interaksi sosial untuk membangun kesepakatan antara kelompok masyarakat dengan organisasi.

4) Mengembangkan potensi masyarakat
Untuk membangun lembaga dan organisasi keswadayaan masyarakat ditingkat lokal untuk memperkuat solidaritas masyarakat dalam memecahkan berbagai masalah.

5) Membuka ruang gerak seluas-luasnya bagi masyarakat
Untuk terlibat dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan melalui pengembangan forum yang dibangun dan dimiliki masyarakat setempat.

c. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat terutama mereka mampu meningkatkan kesejahteraan secara mandiri dalam proses ini lembaga berperan sebagai fasilitator. Menurut Edi Suharto, mengatakan pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat dengan 5P yaitu:

- 1) Pemukiman, pemberdayaan masyarakat harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
- 2) Penguatan, pemberdayaan harus mampu menumbuh kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menjang kemandirian mereka.
- 3) Perlindungan, pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
- 4) Penyokongan, pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
- 5) Pemeliharaan, pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berdua.

2. Teori Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah kondisi dimana seorang merasa nyaman, damai, dan terpenuhinya segala hak-haknya yang terus diterima. Kesejahteraan merupakan hal utama dalam segala suatu lembaga atau keadaan masyarakat, karena kesejahteraan adalah pendorong dalam mencapai tujuan dan hasil dari proses yang dilakukan. Kesejahteraan dalam masyarakat yaitu suatu kegiatan yang berjalan di tengah-tengah masyarakat bersifat terorganisasikan dengan tujuan untuk membantu penyesuaian dan timbal balik antar individu dan anggota masyarakat dalam meningkatkan tatanan sosial yang baik dan teratur.

Syafruddin mengutip pendapat Badan Pusat Statistik bahwa kesejahteraan adalah suatu kondisi dimana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani rumah tangga dapat terpenuhi sesuai dengan tingkat hidup.²⁵ Hamirul mengutip pendapat Midgley bahwa kesejahteraan adalah keadaan kehidupan masyarakat yang terbentuk ketika berbagai permasalahan sosial dapat dilaksanakan dengan baik, kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan dapat dimaksimalisasikan kesempatan sosialnya.²⁶ Syamsul Arrifin dan Yoyok Soesatyo mengutip pendapat Zulhanafi bahwa masyarakat dapat disebut sejahtera apabila masyarakat tersebut dapat memenuhi hidupnya secara mandiri.²⁷

²⁵ Syafruddin, et.all., *Op.Cit.*, h. 13.

²⁶ Hamirul, *Metode Penelitian Dalam Kerangka Patologi Birokrasi*, 2020, h.175.

²⁷ Syamsul Arrifin dan Yoyok Soesatyo, *Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran, Dan Konsumsi Dalam Bingkai Kesejahteraan Masyarakat*, (Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2020), Cet. Ke-1, h.37.

Husmiati mengutip pendapat Walter Friendlander, kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisir dari pelayanan sosial dan lembaga sosial yang dibuat untuk membantu individu maupun kelompok untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai dan mencapai hubungan individu dan sosial yang memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan meningkatkan kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan masyarakat.²⁸

Jadi, disimpulkan bahwa kesejahteraan adalah suatu sistem yang terorganisir dari pelayanan sosial kepada individu, kelompok, maupun masyarakat sehingga membantu masyarakat miskin dapat hidup layak dan terpenuhinya kebutuhan hidup baik secara ekonomi maupun sosialnya.

Syafruddin mengutip pendapat Albert dan Hahnel yang membagi teori kesejahteraan menjadi tiga bagian yakni:

- 1) *Classical utilitarian*, pendekatan ini menekankan bahwa kesenangan dan kepuasan seseorang dapat diukur. Prinsip bagi individu adalah meningkatkan sebanyak mungkin tingkat kesejahteraanya.
- 2) *New contraction approach*, mengangkat adanya kebebasan maksimum dalam hidup seseorang. Penekanan dalam pendekatan ini adalah individu akan maksimalkan kebebasannya untuk

²⁸ Husmiati, et.all., *Op.Cit.*, h. 13.

mengejar barang dan jasa tanpa ada campur tangan dari pihak tertentu.²⁹

3) *Neoclassical welfare theory*, fungsi kesejahteraan merupakan fungsi dari semua keputusan individu.

a. Tujuan Kesejahteraan

La Hadifa mengutip pendapat Fahrudin kesejahteraan sosial terdapat dua tujuan yaitu:

- 1) Untuk kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, pangan, kesehatan, dan hubungan sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
- 2) Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik dengan lingkungannya seperti menggali sumber-sumber meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup yang memadai.³⁰

Adapun penyelenggaran kesejahteraan sosial mempunyai beberapa tujuan yaitu:

- 1) Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan keberlangsungan hidup.
- 2) Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian.
- 3) Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial.

²⁹ Husmiati, et. All., *Op. Cit.*, h .13,

³⁰ La Hadifa, *Membangun Budaya Anti Korupsi Di Lingkungan Organisasi Pemerintah Daerah (Langkah Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial)*, (Kendari: CV. Adiprima Pustaka, 2019), Cet. Ke-1, h .16.

- 4) Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.³¹

b. Fungsi Kesejahteraan

Fungsi kesejahteraan sosial menurut Afrian Fuadi mengutip pendapat Fahrudin yaitu:

- 1) Fungsi Pencegahan (*Preventif*) yaitu untuk memperkuat individu keluarga dan masyarakat agar terjauhkan dari problem sosial baru.
- 2) Fungsi Pengembangan (*Development*) yaitu untuk meneruskan sumbangan langsung maupun tidak langsung terhadap proses pembangunan dan sumber daya sosial dalam masyarakat.
- 3) Fungsi Penunangan (*Supportive*) berfungsi mencakup kegiatan untuk membantu mencapai tujuan bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain.³²

c. Indikator Kesejahteraan

Untuk mengukur tingkat kesejahteraan manusia, Badan Pusat Statistik memiliki beberapa indikator yang dapat digunakan yaitu sebagai berikut:

- 1) Pendapatan yaitu indikator yang dapat menggambarkan kesejahteraan masyarakat. Maksud pendapatan disini adalah penerimaan total kas yang diperoleh seseorang atau rumah tangga selama periode waktu tertentu (1 tahun).

³¹ Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kesejahteraan Sosial

³² Afrian Fuadi, *Keragaman Dalam Dinamika Sosial Budaya Kompetensi Sosial Kultural Perekat Bangsa*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h .26.

- 2) Perumahan dan pemukiman yaitu sebagai pusat pendidikan keluarga dan memajukan keunggulan generasi yang akan datang.
- 3) Kesehatan yaitu menjadi indikator kesejahteraan dengan mampu atau tidaknya masyarakat menjalani pengobatan dari jasa kesehatan sehingga dapat membiayai obat yang dibutuhkan secara memadai.³³

Hubungan teori ini dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) terhadap peningkatan penghasilan masyarakat di Kenten Azhar Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Sebab dari teori inilah, maka peneliti dapat memperoleh hasil apakah program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dapat membantu meningkatkan penghasilan masyarakat sekaligus dengan serangkaian dalam mensejahterakan anggota masyarakat tersebut

3. Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan kelompok usaha binaan Kementrian Sosial Republik Indonesia yang dibentuk dari beberapa keluarga binaan sosial untuk melaksanakan usaha ekonomi produktif dan usaha

³³ Apip Alansori dan Erna Listyaningsih, *Kontribusi UKMK Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, (Yogyakarta: ANDI (Anggaran IKAPI), 2020), h .52-53.

kesejahteraan sosial dalam rangka kemandirian usaha untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.³⁴

Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) didasari oleh kedekatan tempat tinggal, jenis usaha atau keterampilan anggota, ketersediaan sumber atau keadaan geografis, latar belakang budaya, serta memiliki motivasi yang sama.³⁵

Keberadaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan sarana untuk meningkatkan kemajuan ekonomi dan sosial masyarakat miskin, meningkatkan intropeksi dan kerjasama kelompok, memanfaatkan potensi dan sumber daya sosial dan ekonomi setempat, memperkuat budaya kewirausahaan, dan mengembangkan akses pasar dan menjalin kemitraan sosial ekonomi dengan berbagai pihak terkait sehingga setiap anggota dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dalam kegiatan ekonomi dan komersial yang produktif, pekerjaan kesejahteraan sosial dan keterampilan berorganisasi.³⁶

Kehidupan komunitas tidak terlepas dari dinamika kelompok, karena kehidupan komunitas tidak lepas dari kekuatan-kekuatan yang terlibat dalam pencapaian tujuan karena bergantung pada dinamika maka keberhasilan rencana kerja sama anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bisa ditentukan.

³⁴ Haryati Roebiyanto, dkk., *Dampak Sosial Ekonomi Program Pelanggaran Kemiskinan Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)*, (Jakarta: P3KS Press, 2011), h. 45.

³⁵ Wawan Mulyana, dkk., *Pedoman Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Melalui Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) Tahun 2011*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Departemen RI, 2011), h. 13.

³⁶ Kementerian Sosial RI Direktorat Jenderal, *Pemberdayaan Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan*, *Op.Cit.*, h. 7-8.

Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) didasari oleh kedekatan tempat tinggal, jenis usaha atau keterampilan anggota, ketersediaan sumber atau keadaan geografis, latar belakang kehidupan budaya, serta memiliki motivasi yang sama.³⁷ Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan upaya mempercepat penghapusan kemiskinan dengan tujuan untuk peningkatan kemampuan berusaha para anggota secara bersama dalam kelompok, peningkatan pendapatan, pengembangan usaha, peningkatan kepedulian dan kesetiakwaan sosial diantara para anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan masyarakat sekitar.³⁸

a. Tujuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Pada dasarnya tujuan dibentuknya Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di masyarakat adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia bagi masyarakat. Pemahaman tentang mutu hidup dan diyakini oleh masyarakat tersebut nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat akan berbeda dari suatu masyarakat ke masyarakat lain. Dengan demikian rumusan tujuan menjadi tolak ukur dari kegiatan yang dilakukan.

Tujuan dari Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ini adalah untuk memperkuat motivasi dari kerjasama kelompok, memberantas kemiskinan, meningkatkan kemampuan anggota dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan

³⁷ Wawan Mulyana, *Pedoman Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Melalui Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) Tahun 2011*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Departemen Sosial RI, 2011), h. 13.

³⁸ B. Mulyadi, dkk., *Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Fakir Miskin*, (Jakarta: Fuslit Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial RI, 2007), h. 12-13.

membekali anggota dengan cara memecahkan masalah dalam keluarga dan lingkungannya.

b. Sasaran Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Kriteria sasaran dalam program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yaitu:

- 1) Warga masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan atau pengangguran.
- 2) Masyarakat yang mempunyai tingkat pendidikan rendah seperti tidak tamat sekolah, dan tidak mempunyai keterampilan.
- 3) Penduduk usia produktif 27-40 tahun.
- 4) Mempunyai kemampuan membaca, menulis dan berhitung.
- 5) Prioritas berdomisili tidak jauh dari tempat penyelenggaraan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

c. Indikator Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebagai kelompok usaha yang dikelola secara bersama dan dapat dikatakan berhasil apabila memenuhi kriteria dari indikator. Menurut Istiana Hermawati, menyebutkan beberapa indikator keberhasilan sebagai berikut:

- 1) Secara umum keberhasilan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tercermin pada meningkatkan taraf kesejahteraan sosial yang ditandai oleh meningkatnya dinamika sosial, meningkatnya kemampuan dan keterampilan pemecahan masalah.

- 2) Secara khusus perkembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ditunjuk oleh berkembangnya kerjasama diantara sesama anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan masyarakat sekitar, meningkatnya pendapatan anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE), tumbuh kembangnya kesadaran dari rasa tanggung jawab sosial dalam bentuk pengumpulan dana iuran dan kesetiakawanan sosial.

4. Penghasilan Masyarakat

Suatu kondisi keadaan yang berhubungan dengan masyarakat yang ditinjau dari segi ekonomi keadaan tersebut meliputi kebutuhan masyarakat itu sendiri dengan cara memenuhi kebutuhan. Dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat bekerja sesuai dengan keahliannya guna mendapatkan penghasilan yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut Greogori Mankiw menyebutkan pendapatan masyarakat sebagai pendapatan (personal income) yaitu pendapatan yang diterima rumah tangga dan bisnis ekonomi non perusahaan. Penghasilan (income) baik meliputi pendapatan maupun keuntungan. Pendapatan adalah penghasilan yang ditimbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dikenal dengan sebutan seperti penjualan, penghasilan dan sewa.³⁹ Kontribusi pendapatan dari satu jenis kegiatan terhadap

³⁹ Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, (Jakarta: Salemba Empat, 1984), h .233.

pendapatan hasil rumah tangga pada produktifitas faktor produksi yang digunakan dari jenis kegiatan yang bersangkutan.

Pendapatan adalah satu indikator yang dapat menggambarkan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan yang diperoleh oleh setiap individu biasanya terdapat perbedaan keadaan ini wajar terjadi karena setiap individu memiliki perbedaan keahlian di bidang masing-masing.

Sumber penghasilan utama rumah tangga menjadi salah satu indikator tingkat kesejahteraan yang diharapkan dapat mencerminkan kondisi sosial ekonomi di suatu rumah tangga. Cerminan tingkat kesejahteraan dapat dilihat dari miskin atau tidak miskin yang ditentukan dari rata-rata pengeluaran per kapita perbulan.⁴⁰ Pendapatan masyarakat adalah perolehan barang, uang yang diterima atau dihasilkan oleh masyarakat berdasarkan aturan yang bersumber dalam pendapatan masyarakat yang merata sebagai suatu sasaran merupakan masalah yang sulit dicapai maupun berkurangnya kesenjangan adalah salah satu tolak ukur keberhasilan.

a. Sumber Penghasilan Masyarakat

- 1) Dari upah atau gaji yang diterima sebagai tenaga kerja yaitu disebabkan oleh perbedaan karakteristik pekerjaan (keahlian, pelatihan, pendidikan, dan pengalaman).
- 2) Dari hak modal yaitu pendapatan yang dihasilkan rumah tangga bergantung pada jumlah dan jenis hak yang dimilikinya.

⁴⁰ Sub Direktorat Analisis Statistik, *Op. Cit*, h .69.

- 3) Dari Pemerintah yaitu pendapatan transfer yang mengalir dari penerimanya secara substansial tetapi tidak secara eksklusif ditunjukkan pada masyarakat yang berpendapat secara umum untuk memberikan pendapatan orang yang membutuhkan.⁴¹

b. Faktor-Faktor Penghasilan Masyarakat

Menurut Bintari Suprihatin faktor yang mempengaruhi penghasilan masyarakat sebagai berikut.⁴²

- 1) Kerja yang tersedia, dengan semakin tinggi atau semakin besar kesempatan kerja tersedia berarti banyak penghasilan yang diperoleh dari hasil kerja tersebut.
- 2) Kecakapan dan keuletan kerja, keahlian kerja yang tinggi akan dapat meningkatkan efisiensi yang pada akhirnya berpengaruh pula terhadap penghasilan.
- 3) Keuletan kerja, dapat disamakan dengan ketekunan dan keberanian untuk menghadapi segala macam tantangan.

⁴¹ Karl E. Case dan Ray C. Fair, *Prinsip-Prinsip Ekonomi*, Ed. Ke-8, (Jakarta: Erlangga, 2007), h.445.

⁴² Candora, *Ibid.*, h.6.